



RENCANA

K E R J A

T A H U N 2021

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renja sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renja ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami akui menyusun Renja ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renja ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

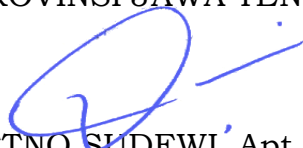
Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renja ini dapat selesai disusun. Renja ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Renja ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan Tahun 2020 serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renja ini.

Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renja dan RKPD Tahun 2021 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

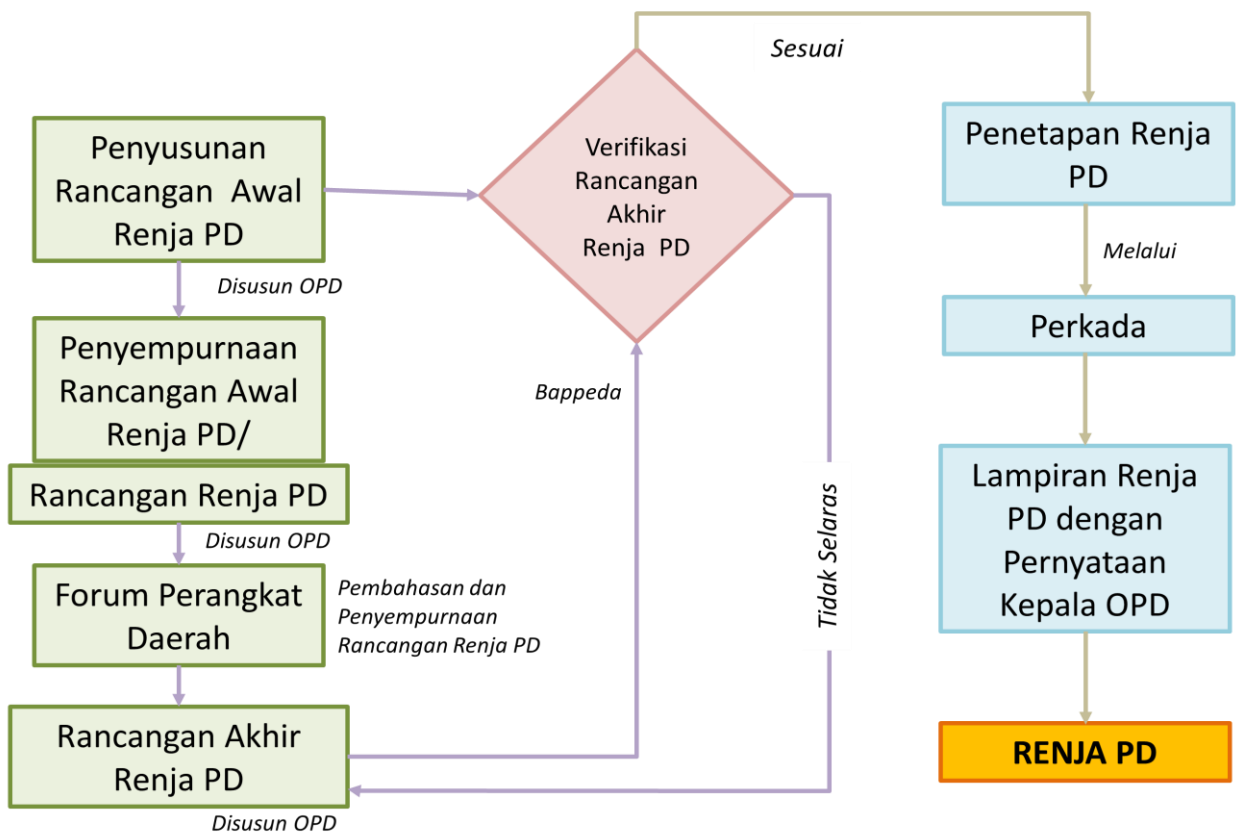
1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.)
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Povinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);

38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 95);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
41. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah:

BAB I **Pendahuluan**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V **Penutup**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan prakiraan capaian tahun 2020, mengaju pada APBD Tahun 2020 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi - Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya - Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia 	<p align="center">30</p> <p align="center">91,43</p> <p align="center">100</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	<p align="center">25</p> <p align="center">80</p> <p align="center">83,33</p>	<p align="center">100</p> <p align="center">88,57</p> <p align="center">83,33</p>	<p align="center">400</p> <p align="center">110,71</p> <p align="center">100</p>	<p align="center">100</p> <p align="center">88,57</p> <p align="center">83,33</p>	<p align="center">30</p> <p align="center">82,86</p> <p align="center">83,33</p>	<p align="center">0 (TW I)</p> <p align="center">88,57 (TW I)</p> <p align="center">0 (TW I)</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">96,8</p> <p align="center">-</p>			
2	02	15	001	Pemberdayaan Perempuan	1) Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	350	-	30	60	200	60	30	0 (TW I)	-
2	02	15	001		2) Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	43.500	-	20.700	20.700	100	20.700	5.700	1.069 (TW I)	2,4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
2	02	15	00 2	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	1)Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	73	-	73	73	100	73	73	20 (TW I)	27,39
					2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100	-	100	100	100	100	100	100 (TW I)	100
2	02	15	00 3	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	1) Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	32	-	28	31	110,71	32	29	31 (TW I)	96,8
					2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	100	-	100	100	100	100	100	100 (TW I)	100
2	02	15	00 4	Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	36	-	34	34	100	36	34	35 (TW I)	97,22
2	02	15	00 5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5	-	5	5	100	5	5	5 (TW I)	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
		Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20	-	20	20	100	20	20	0 (TW I)	-			
		Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	30	-	30	30	30	30	30	0(TW I)	-			
2	02	15	006	Penyusunan data dan informasi PPA	Jumlah laporan data dan informasi PPA	6	-	5	5	100	5	5	1 (TW I)	20
2	02	16		Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000	-	5,87	5,89	99,66	5,89	5,81 per 100.000	1,08 per 100.000 (TW I)	522
					Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	-	12,76	12,44	102,57	12,44	12,76 per 100.000	2,08 per 100.000 (TW I)	594
2	02	16	001	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	967	-	1.007	1.024	98,3	1.024	997	125 (TW I)	797
2	02	16	002	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1.158	-	1.198	1.106	198,32	1.106	1.188	195(TW I)	593,8
2	02	16	003	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100	-	100	100	100	100	100	100 (TW I)	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
		dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif												
2	08	15	001	Peningkatan kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	1.443.023	-	1.346.822	1.374.108	102,03	1.374.108	1.370.872	1.360.538 (TW I)	94,28
2	08	15	002	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	15	-	3	2	66,67	2	3	0 (TW I)	-
					Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	35	-	35	35	100	35	35	0 (TW I)	-
2	08	15	003	Pemetaan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	10	-	2	2	100	2	2	0 (TW I)	-
2	08	15	004	Penyediaan profil kependudukan dan KB	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	5	-	1	1	100	1	1	0 (TW I)	-
2	08	15	005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB dan KB	701.746	-	832.303	866.926	96,01	866.926	832.303	868.607 (TW I)	80,78
2	08	15	006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	20	-	20	20	100	20	20	0 (TW I)	-
2	08	16		Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok tribina yang aktif	96,30	-	96,1	96,13	100,03	96,13	96,15	91,67	95,19
					Persentase UPPKS yang aktif	90,20	-	89,75	90,57	100,91	90,57	89,75	87,59	97,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
		Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	-	-	-	-	-		20	-	0			
2	08	16	00 2	Advokasi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26.779	-	26.723	25.897	96,01	25.897	26.723	21.886	84,51
2	08	16	00 3	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10	-	2	2	100	2	4	0 (TW I)	-
2	08	16	00 4	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15.456	-	15.379	13.120	85,31	13.120	15.404	10.115	65,44
2				Non Urusan		-	-	-	-	-			-	-
2	02			Eks BAU									-	-
2	02	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90	-	-	-	-		90	23,69	26,32
2	02	01	00 1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	20	4	4	4	100	8	4	8	40
2	02	01	00 2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	00 3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
2	02	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2018)			Tingkat Realisasi s/d Tarrget Akhir 2018-2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(11/4)			
2	02	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	24	12	24	40
2	02	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	50	10	10	10	100	20	10	20	40
2	02	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	4	-	-	-	-	0	-	-	0
2	02	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	500	100	100	100	100	200	100	92	92
2	02	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/S eminar	100	-	-	-	-	20	5	5	5
2	02	01	016	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	-	-	-	-	12	3	3	5
2	02	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	-	-	-	-	100	30	30	30
2	02	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	-	-	-	-	2	1	1	16,66
2	02	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	-	-	-	-	1	-	-	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			30	30	-	-	0 (tw I)				
2	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya			82,86	85,71	-	-	88,57 (tw I)				
3	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia			83,33	100	-	-	0 (tw I)				
4	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			80	80	-	-	0 (tw I)				
5	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik			5.700	5.700	-	-	1.069 (tw I)				
6	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			73	73	-	-	20 (tw I)				
7	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani			100	100	-	-	100 (tw I)				
8	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya			29	30	-	-	31 (tw I)				
9	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani			100	100	-	-	100 (tw I)				
10	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan			34	35	-	-	35 (tw I)				
11	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan			5	5	-	-	5 (tw I)				
12	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan			20	20	-	-	0 (tw I)				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan			30	30	-	-	0 (tw I)				
14	Jumlah laporan data dan informasi PPA			5	5	-	-	1 (tw I)				
15	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak							1,43 (tw I)				
16	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			5,81	5,76	-	-	1,08 (tw I)				
17	Rasio korban kekerasan terhadap anak			12,66	12,56	-	-	2,08 (tw I)				
18	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa			997	987	-	-	125 (tw I)				
19	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak			1.188	1.178	-	-	195 (tw I)				
20	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	-	-	100 (tw I)				
21	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			8	8	-	-	2 (tw I)				
22	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			15	15	-	-	0 (tw I)				
23	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	-	-	100 (tw 1)				
	URUSAN DALDUK KB					-	-					
24	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk			16,67	25	-	-	0 (tw I)				
25	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			28,50	29	-	-	20,60 (tw I)				
26	Unmetneed KB			12,25	11,75	-	-	13,06 (tw I)				
27	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif			100	100	-	-	0 (tw I)				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	Jumlah Peserta KB MKJP			1.370.872	1.394.922	-	-	1.360.538 (tw I)				
29	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun			3	3	-	-	0 (tw I)				
30	Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk			35	25	-	-	0 (tw I)				
31	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi			2	2	-	-	0 (tw I)				
32	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan			1	1	-	-	0 (tw I)				
33	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB			799.664	767.025	-	-	868.607 (tw I)				
34	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB			20	20	-	-	0 (tw I)				
35	Persentase kelompok tribina yang aktif			96,15	96,20	-	-	91,67 (tw I)				
36	Persentase UPPKS yang aktif			89,75	90	-	-	87,59 (tw I)				
37	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga			40	60	-	-	0 (tw I)				
38	Jumlah kelompok Tribina yang aktif			26.737	26,75	-	-	21.886 (tw I)				
39	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga			2		-	-	0 (tw I)				
40	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif			15.404	15,422	-	-	10.115 (tw I)				
	EKS BAU											
41	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	-	-	100 (tw I)				
42	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			4	4	-	-	1 (tw I)				
43	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
44	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
45	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
46	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
47	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
48	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
49	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
50	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
51	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
52	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			10	10	-	-	0 (tw I)				
53	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			100	100	-	-	0 (tw I)				
54	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar			20	20	-	-	5 (tw I)				
55	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah							1 (tw I)				
56	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
57	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	-	-	100 (tw I)				
58	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1	1	-	-	1 (tw I)				
59	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			1	1	-	-	0 (tw I)				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di kabupaten/kota telah ditampung dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota dengan tetap bersinergi pada capaian target indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat kabupaten/kota sendiri. Sinergi tersebut dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan yang integratif.

Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan sinergitas yang optimal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan nasional.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Rendahnya ketertarikan perempuan menjadi calon legislatif;
 - b. Rendahnya akses ekonomi bagi perempuan;

- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
 - e. Kelompok kerja PUG dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
 - f. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak;
 - g. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
 - h. Terbatasnya pedoman pelaksanaan dan sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
 - i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan.
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
 - b. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
 - c. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
 - d. Terbatasnya dukungan anggaran sehingga peran KIE program KB kurang maksimal;
 - e. Belum adanya dokumen kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang lebih komprehensif;
 - f. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proporsional dan memadai dengan tuntutan terhadap pelayanan KB;
 - g. Menurunnya peran aktif kelompok BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
 - h. Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- b. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
 - c. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
 - e. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
 - f. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - g. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan;
 - i. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
 - j. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
 - k. Telah terbentuknya kelompok perlindungan anak desa berbasis masyarakat.
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
 - b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMN dan RPJMD dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk;
 - c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;

d. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain :

1. Kesenjangan gender

Rata-rata lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Demikian pula pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan masih jauh dari pengeluaran perkapita laki-laki.

2. Pemenuhan Hak Anak

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan pada tahun 2019 sebanyak 31 kabupaten/kota atau 88,57% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 4 kabupaten/kota lainnya atau 20% perlu didorong pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 sebanyak 1.024 Kasus Perempuan dewasa dan 1106 Kasus anak. Triwulan I tahun 2020 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa berjumlah 128 kasus dan Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sejumlah 195 Kasus Walaupun data pada Tahun 2020 Triwulan I masih rendah akan tetapi bisa saja kasus akan meningkat, sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya.

4. Kesertaan Keluarga Berencana

Kepesertaan KB Aktif tahun 2018 sebesar 73,69% mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 73,4% dan atau menurun sebesar 0,29%. adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmet need) tahun 2018 sebesar 9,95 menurun di tahun 2019 sebesar 13,03% atau menurun 3,08%, adapun yang menyebabkan kedua indikator tersebut menurun disebabkan oleh 1) Rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB (takut efek samping, keyakinan agama), 2)

Jumlah PLKB yang semakin berkurang dikarenakan pensiun;

3) Peran lembaga masyarakat dirasakan belum maksimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan (Permendagri 90)				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	6.275.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah; Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90%; 100%	3.920.952.000
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	997.360.000					
3	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi; Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	30%; 85,71%	13.419.350.000	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi;	30%;	5.760.000.000

4	Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan; Rasio korban kekerasan terhadap anak;	5.76.Per 100.000; 12.56.Per 100.000	7.068.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	100%	350.000.000
5.						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya	91,43	730.000.000
6.						Program Perlindungan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5,76 per 100.000	650.000.000
7.						Program Perlindungan Khusus Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,44 per 100.000	500.000.000
8.	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Semarang dan luar Semarang	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); Unmetneed KB	29;u11,75	7.509.766.000	Program Pengendalian Penduduk	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif; Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	100; 11,42	575.000.000
9.						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); Unmetneed KB	26,39; 12,66	6.450.000.000

10	Keluarga Sejahtera	Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif; Persentase ormas dan mitra kerja dalam; Persentase UPPKS yang aktif	96,20; 60; 90	5.576.000.000	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kelompok tribina yang aktif; Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga; Persentase UPPKS yang aktif	85,57; 60; 68,25	650.000.000
----	--------------------	----------------------------	---	---------------	---------------	--	----------------------------------	--	------------------	-------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PPPA					
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	38 OPD Provinsi dan 35 kab/kota	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	5.700 orang 80 orang	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5 Kelompok	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan data dan informasi PPA		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
5	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	35 Lokasi 30 Kab/Kota	
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	30 Kelompok	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
7	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	987 Kasus	Pemberi saran: LRC KJHam
8	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 Kelompok	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
10	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
12	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	3 Dokumen 35 Lokasi	Pemberi saran: Koalisi Kependudukan
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	Pemberi saran: Koalisi Kependudukan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN DALDUK KB				
IV	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
15	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Peserta KB MKJP Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	1394922 Orang 767025 Orang	
16	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
17	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26751 Kelompok	
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15422 Kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 Kelompok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 belum terbit dikarenakan Pemerintah Pusat masih menyusun Draft RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga yang dijadikan pedoman adalah Tujuan pada Renstra Kemen PPPA yang diselaraskan dengan arahan Presiden tahun 2020 - 2024 :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan hak anak
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 3.1.

**Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
dengan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020**

No	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD TAHUN 2021	
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
1	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran			
	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah Persentase penduduk miskin pedesaan 12,65%	1. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	1. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana
				2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan			
	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,06	2. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak
				2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah beserta indikatornya yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,16	1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,24
		2. Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	88,57		Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	28,57
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,22 per 100.000	2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,09 per 100.000
2	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR)	2,22	3. Meningkatkan kesertaan keluarga berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	75,25
				4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga pra sejahtera	20,64

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah tahun 2021 dan sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Telah tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan rumusan program dan kegiatan disusun guna mendukung capaian visi

pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi yang dilaksanakan antara lain :

1. Misi ke – 3, yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Misi ini bertujuan untuk : **1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata;** dan 2) stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Sasaran yang ingin dicapai adalah: **1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah;** 2) menurunnya pengangguran terbuka; 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
2. Misi ke – 4, yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan; Misi ini bertujuan untuk : **1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);** dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; **3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;** 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Rumusan program dan kegiatan tahun 2021 juga mempertimbangkan untuk mendukung pencapaian SDG's dengan indikator antara lain :

1. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang;
2. Unmetneed KB;
3. Jumlah peserta KB MKJP;
4. Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak ber KB;
5. Rasio korban kekerasan terhadap perempuan;
6. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
7. Rasio korban kekerasan terhadap anak;
8. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak;

9. Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi;
10. Jumlah perangkat daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan PPRG;
11. Persentase keluarga berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender terlayani.

Program dan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dalam prioritas pembangunan melalui penyediaan *basic life access* (klaster 1) dan penguatan *sustainable livelihood* (klaster 2 dan 3).

Pengembangan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah/lokal setempat menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan utamanya untuk pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 mencakup 7 program terdiri dari program urusan PPPA, Dalduk KB dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 38 kegiatan. Lokasi program dan kegiatan tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan alokasi yang terlebih pada 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan kelompok sasaran kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 26.672.278.000,- dengan rincian pagu indikatif pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp 7.650.000.000,-; pagu indikatif pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp 5.200.000.000,-; dan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp 13.822.278.000,-.

Program dan kegiatan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan maju 2022 Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SAT	2021		2022	
												Target		Target	
												Volume	Rp.	Volume	Rp.
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Angka	72,6		75,18	
								Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak			%	94,28		91,43	
								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak			Per 100.000	8,22		8,15	
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan							Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja			%	34,24		34,27	

								Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak			%	57,14		31,43	
		2.02.15	2.08.02	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			%	30		30	
		2.02.15.002	2.08.02.1.01			Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						320.000.000		1.660.000.000
								Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			OPD	73	320.000.000	73	1.660.000.000

									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		73	320.000.000	73	1.660.000.000
										Evaluasi Pembangunan PP dan PA (APE) Tingkat Nasional				
										Fasilitasi PUG dan PPRG bagi Kabupaten/Kota				
										Lomba Project Implementasi PUG bagi SMA/SMK				
										Pelatihan PUG bagi SMA/SMK				
										Peningkatan Wawasan Terkait PUG				
										Penyusunan Modul PUG SMA/SMK				
										Rapat Koordinasi PUG Kabupaten/Kota				

										Rapat Koordinasi PUG Provinsi					
										Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi					
		2.02.15. 001	2.08.02. 1.02			Pemberdaya an Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi						4.840.000.000		7.077.000.000
		2.02.15. 001				Pemberdaya an Perempuan									
								Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik			Orang	5700	680.000.000	5700	2.530.000.000

									Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		3000	680.000.000	5700	2.530.000.000
										Capacity Building tentang Public Speaking untuk Anggota Legislatif Provinsi Jawa Tengah				
										Peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif Provinsi Tentang PUG				
										Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Proses Pengambilan Keputusan				
								Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi		Orang	80	4.160.000.000	80	4.547.000.000

									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		80	4.160.000.000	80	4.547.000.000	
										Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB					
										Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB					
										Jasa Tenaga Teknis					
										Monev Pelaksanaan PPEP di Kabupaten/Kota					
										Pelatihan PPEP					
										Peningkatan Wawasan terkait Pemberdayaan Ekonomi Perempuan					

										Rapat Persiapan PPEP					
		2.02.15.005	2.08.02.1.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						600.000.000		1.045.000.000
								Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan			Kelompok	5	600.000.000	5	1.045.000.000
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			5	600.000.000	5	1.045.000.000

									Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		6	350.000.000	6	1.210.000.000
										Bimbingan Teknis Pengembangan aplikasi E-kekerasan				
										Bimbingan Teknis pengembangan aplikasi layanan pengaduan korban kekerasan berbasis android				
										Media KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan thd perempuan dan anak				
										Pendampingan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan di daerah				
										Pengembangan aplikasi E-kekerasan				

									Pengembangan aplikasi layanan pengaduan korban kekerasan berbasis android					
									Penyusunan dokumen profil perempuan, profil anak, isu perempuan, isu anak dan analisis kekerasan					
									Rakor data kekerasan					
									Rakor data pilah gender dan anak kab/kota dan OPD Provinsi					
			2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya		%	91,43		88,57	

		2.02.15.003	2.08.06.1.01			Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							340.000.000		1.868.000.000
		2.02.15.004				Peningkatan Partisipasi Anak										
								Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan			Lokasi	35	90.000.000	35	735.000.000	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			35	90.000.000	35	735.000.000	
										Konferensi Forum Anak Jawa Tengah						
										Pertemuan Rutin Pengurus dan Pelaksanaan Program Kerja FAN Jateng						

								Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya		Kabupaten/Kota	30	250.000.000	31	1.133.000.000	
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		30	250.000.000	31	1.133.000.000	
										Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak					
										Sosialisasi Online: Suara Bocah Jateng					
										Tenaga Teknis Kegiatan					
										Verifikasi KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah					

										Video Conference terkait Pemenuhan Hak Anak					
		2.02.15. 005	2.08.06. 1.02			Penguatan dan Pengembang an Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						50.000.000		1.600.000.000
								Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga			Kelompo k	30	50.000.000	30	1.600.000.000
									Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			20	50.000.000	30	1.600.000.000

										Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) bagi pegiat media					
										Pemanfaatan media digital untuk PUHA					
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak							Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			Per 100.000	7,78		8,05	
			2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			Per 100.000	5,76		5,7	
		2.02.16.001	2.08.03.1.01			Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000		1.911.000.000
								Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa			Kasus	987	250.000.000	977	1.911.000.000

									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			987	250.000.000	977	1.911.000.000
										Advokasi Pembentukan Pos Pengaduan di Kawasan Industri					
										Alat Tulis Kantor					

									Jasa Tenaga Teknis						
									Kerjasama dan Konsultasi dalam rangka Perlindungan Perempuan						
									Penguatan Perlindungan Perempuan di Kab/Kota						
									Penyempurnaan Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Kampanye						
									Penyusunan Draft Pergub PPT Provinsi Jawa Tengah						
									Penyusunan Draft RAD Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan						
									Pertemuan Need Assesmen Perempuan Kelompok Rentan						

		2.02.16. 003	2.08.03. 1.02			Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000		495.000.000
--	--	-----------------	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------

								Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			%	100	200.000.000	100	495.000.000
									Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100	200.000.000	100	495.000.000
										Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan					
		2.02.16.004	2.08.03.1.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						200.000.000		473.000.000

								Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			Kelompok	8	200.000.000	8	473.000.000
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8	200.000.000	8	473.000.000
										Audiensi ke 6 Lembaga					
										Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak					

									Kegiatan Rapat Pengawasan Penanganan Kasus PPT Provinsi Jawa Tengah					
									Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kab/Kota					
									Pengawasan kinerja penyelenggara perlindungan bagi korban kekerasan					
									Workshop Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Jaringan dan Komunitas					
									Workshop Perlindungan khusus bagi anak					
		2.02.16	2.08.07	Perlindungan Perempuan Dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Rasio korban kekerasan terhadap anak		Per 100.000	12,44		12,46	

		2.02.16. 002	2.08.07. 1.01			Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		2.145.000.000	
								Jumlah kasus kekerasan terhadap anak			Kasus	1178	200.000.000	1168	2.145.000.000
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			1178	200.000.000	1168	2.145.000.000
										Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak					
										Advokasi Perlindungan Anak dengan HIV / AIDS					

										Assesment Perkawinan pada Usia Anak					
										Pelatihan Pencegahan Kekerasan di Sekolah melalui Disiplin Positif					
										Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak					
										Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak					
		2.02.16.006	2.08.07.1.02			Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						250.000.000		1.870.000.000
								Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			%	100	250.000.000	100	1.870.000.000

									Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			100	250.000.000	100	1.870.000.000
										Penyediaan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak					
		2.02.16.005	2.08.07.1.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		850.000.000

								Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya		Kelompok	15	50.000.000	15	850.000.000
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		15	50.000.000	15	850.000.000
										Bimtek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak				
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas								Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		Angka	2,3		2,2	

	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana							Angka pemakaian kontrasepsi/CPR			Angka	64,35		75,5	
			2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif			%	100		100	
								Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk			%	11,42		33,33	
		2.08.15.002	2.14.02.1.01			Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						250.000.000		1.486.000.000

		2.08.15.002				Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan								
								Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun		Dokumen	3	150.000.000	3	512.000.000
								Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			1	150.000.000	3	512.000.000
									Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kependudukan					
									Penyusunan GDPK					
									Workshop Advokasi Penyusunan Kebijakan Kependudukan					

									Workshop Penguatan Jejaring Pengendalian Kependudukan						
									WorkShop Penyusunan GDPK						
							Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk			Lokasi	35	100.000.000	35	974.000.000	
								Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			35	100.000.000	35	974.000.000	
									Fasilitasi Launching SSK						

										Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kependudukan (SSK)					
										Monev					
										Tenaga Teknis					
										Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan					
										Workshop Pengendalian Kependudukan					
		2.08.15. 003	2.14.02. 1.02			Pemetaan Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						75.000.000		286.000.000
		2.08.15. 004				Penyediaan profil kependuduka n dan KB									
								Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan			Dokume n	1	25.000.000	1	165.000.000

									Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			1	25.000.000	1	165.000.000
										Penyusunan Profil kependudukan , KB dan Pembangunan Keluarga					
										Rakor Pengumpulan dan Penyusunan data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					
								Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi			Dokumen	2	75.000.000	2	286.000.000
									Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			2	75.000.000	2	286.000.000
										Analisa Dampak Pembangunan Kependudukan					

										Monev Parameter Pengendalian Kependudukan					
										Pemetaan dan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk					
		2.08.15	2.14.03	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		%	26,39			29,5	
								Unmetneed KB		%	12,66			11,25	
		2.08.15. 005	2.14.03. 1.01			Penggerakan dan Pengembang an KIE pengendalian penduduk dan KB	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					3.600.000.000			6.145.000.000

		2.08.15. 001				Peningkatan kesertaan KB MKJP								
								Jumlah Peserta KB MKJP		Orang	1394922	2.800.000.000	1418973	4.105.000.000
									Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1275955	2.800.000.000	1418973	4.105.000.000
										Evaluasi Pelayanan KB MKJP				
										Orientasi Peningkatan Kesertaan KB MKJP bagi PPKBD				
										Pelayanan KB MKJP				

								Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB			Orang	767025	800.000.000	734385	2.040.000.000
									Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk Melalui Mitra Kerja			767025	800.000.000	734385	2.040.000.000
										Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja					
										Bhakti Sosial Pelayanan KB Aisviah					
										Jasa Tenaga Teknis					
										Konsultasi Ke BKKB Pusat					
										Konsultasi ke PKK Pusat					
										Lomba Kampung KB					
										Pelaksanaan Penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan					
										Pengembangan Model KIE tentang KB-KS					

										Penggerakan dan Bakti sosial Pelayanan KB Aisyiyah					
										Penggerakan dan Bakti Sosial Pelayanan KB Bhayangkara					
										Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB TMKK					
										Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Program KB Muslimat NU					
		2.08.15.006	2.14.03.1.02			Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						50.000.000		180.000.000

								Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB			Kelompok	20	50.000.000	20	180.000.000
									Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			20	50.000.000	20	180.000.000
										Orientasi KB Pria					
										Sadar Kespro Bagi Komunitas Milenial					
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga							Persentase Keluarga Pra Sejahtera			%	21,14		20,14	
		2.08.16	2.14.04	Keluarga Sejahtera	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Persentase kelompok tribina yang aktif			%	85,57		96,25	

								Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga			%	60		80	
								Persentase UPPKS yang aktif			%	68,25		90,1	
		2.08.16.002	2.14.04.1.01			Advokasi Ketahanan Keluarga	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						350.000.000		3.811.000.000
								Jumlah kelompok Tribina yang aktif			Kelompok	26751	350.000.000	26765	3.811.000.000
									Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja			22879	350.000.000	26765	3.811.000.000
										Belanja Jasa Tenaga Teknis					
										Harganas Tingkat Pusat					

										Lomba Pengelola BKB					
										Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB					
										Orientasi Kader Kelompok BKL					
										Orientasi Kader Kelompok BKR					
										Orientasi Kader PIK R					
		2.08.16.004	2.14.04.1.02			Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						150.000.000		2.145.000.000

		2.08.16.003				Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga								
								Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif		Kelompok	15422	150.000.000	15439	2.145.000.000
								Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			10514	150.000.000	15439	2.145.000.000
										Kegiatan Supervisi dan Jaringan Kemitraan Kelompok UPPKS				
										Konsultasi dan Koordinasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok UPPKS				
										Orientasi Kader Kelompok UPPKS				

								Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Kelompok	6	50.000.000	8	177.000.000
								Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				2	50.000.000	8	177.000.000

										Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui Pelatihan Virtual						
										PENINGKATAN WAWASAN UNTUK KETAHANAN KELUARGA						
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah								Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Angka	79			79,05	
								Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Angka	77			80	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah							Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Angka	78,54			78,56	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							Nilai Kepuasan masyarakat			Angka	77			80	

								Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			%	100		100	
		0.00.02.001	X.XX.01.1.01			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						340.096.000		1.500.000.000
		0.00.02.002				Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
								Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			Dokumen	1	158.648.000	1	600.000.000
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			1	158.648.000	1	600.000.000
										Evaluasi perencanaan					
										Rakor Evaluasi					
										Rapat pengendalian Program/kegiatan					

								Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			Dokumen	1	181.448.000	1	900.000.000
									Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			1	181.448.000	1	900.000.000
										Forum OPD					
										Perencanaan Program					
										Rakor Keterpaduan Program					
		0.00.01.001	X.XX.01.1.02			Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan						9.901.326.000		12.500.000.000
								Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			Dokumen	4	9.901.326.000	4	12.500.000.000
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4	9.901.326.000	4	12.500.000.000
										gaji dan tunjangan					
										TPP					

								Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			Bulan	12	5.000.000	12	16.000.000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			12	5.000.000	12	16.000.000
										Belanja buku perpustakaan					
										Belanja surat kabar					
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	12	97.500.000	12	240.000.000
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			12	7.500.000		40.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Pemeliharaan Mebelair					
										Belanja Penggandaan					

									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12	40.000.000	12	100.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor				
										Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
										Belanja Penggandaan				
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		12	50.000.000		100.000.000
										Belanja Alat Listrik dan Elektronik				
										Belanja Alat Rumah Tangga Kantor				
										Belanja Alat Tulis Kantor				
										Belanja Bahan Bakar Genset				
										Belanja Pakan Ikan				
										Belanja Penggandaan				

								Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah		Bulan	12	990.000.000	12	1.650.000.000
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12	277.600.000	12	275.000.000
									Belanja Alat Tulis Kantor					
									Belanja Jasa Kebersihan					
									Belanja pengadaan tempat sampah					
									Belanja Penggandaan					
									Belanja Tisu dan Pengharum Ruangan					
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	712.400.000	12	1.375.000.000
									Belanja Alat Tulis Kantor					
									Belanja Penggandaan					
									Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS					

									Honorarium Tenaga Keamanan/ Pengemudi/ Tenaga Teknis						
								Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah		Bulan	12	650.000.000	12	825.000.000	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	650.000.000	12	825.000.000	
									Pembayaran Air						
									Pembayaran internet						
									Pembayaran Listrik						
									Pembayaran telepon						
								Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Bulan	12	150.000.000	12	440.000.000	

									Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12	150.000.000	12	440.000.000
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
										Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
										Belanja Perjalanan Dinas Representatif					
										Operasional					
								Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			Bulan	12	7.500.000	12	40.000.000
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	7.500.000	12	40.000.000
										Benda Pos dan Surat Menyurat					
										Pemeliharaan Kearsipan					

								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			Bulan	12	675.000.000	12	2.300.000.000
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			12	500.000.000	12	2.000.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Modal alat bantu lainnya					
										Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					
										Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					
										Belanja Pengandaan					
										Belanja Perjalanan Dinas					
										Sewa tanaman					

									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	175.000.000		300.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor				
										Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				
										Belanja Jasa Service				
										Belanja Kelengkapan Kendaraan Dinas Operasional				
										Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				
										Belanja Penggandaan				
										Belanja Penggantian Suku Cadang				
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah		Bulan	12	60.000.000	12	120.000.000

									Penyediaan Makanan dan Minuman			12	60.000.000	12	120.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
										Belanja Makanan dan Minuman Tamu					
								Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			Bulan	12	59.207.000	12	85.000.000
									Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			12	59.207.000	12	85.000.000
										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Penggandaan					
										Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah					
								Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi			Unit	1	0	0	0

									Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1	0	0	0
										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Kendaraan Dinas					
										Belanja Penggandaan					
										Honor Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas					
								Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah			Dokumen	3	109.040.000	3	300.000.000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3	109.040.000	3	300.000.000
										Honorarium pelaksana kegiatan					
										Kesekretariatan					
										Pameran					
										Rakor PPID					

									Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan							
								Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			Dokume n		320.000.000			350.000.000
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				320.000.000			350.000.000
										Honorarium pengadaan barang/jasa						
										Honorarium Pengelola Keuangan Perangkat Daerah						
										Operasional						
								Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			Unit	10	390.000.000	10		1.700.000.000
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10	390.000.000	10		1.700.000.000

										Belanja Alat Tulis Kantor					
										Belanja Modal Alat Pendingin					
										Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					
										Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya					
										Belanja Modal Meubelair					
										Belanja Modal Multimedia Center					
										Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya					
										Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					
										Belanja Modal Personal Komputer					
										Belanja Pengandaan					

		0.00.01.014	X.XX.01.1.04			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						67.609.000		465.000.000
		0.00.01.015				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal									
		0.00.01.023				Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah									
								Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar		Orang	20	20.000.000	20	45.000.000	
									Pendidikan dan Pelatihan Formal		20	20.000.000	20	45.000.000	
									Pendidikan dan Pelatihan						
								Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah		Bulan	12	47.609.000	12	270.000.000	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dalam pelaksanaan Renja. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renja dilakukan melalui proses panjang mulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, Penyempurnaan Rancangan Renja telah melibatkan penjangkauan aspirasi dan identifikasi permasalahan baik melalui Forum Perangkat Daerah maupun mekanisme lainnya, serta verifikasi maupun pendampingan penyempurnaan rancangan Renja oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 sebelum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya tahap akhir adalah Penetapan Renja.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2021 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, etos kerja serta semangat gotong-royong seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.